

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2018). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty. Georgia State University. doi:10.2139/ssrn.471321
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke-5). Balai Pustaka.
- Business Recorder. (2012). *Global comparison of amnesty schemes evaders offered Cheapest Tax Deal*. Diambil kembali dari Business Recorder : <https://fp.brecorder.com/2012/12/201512311262155/>
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diana, & Sari. (2014). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2016). Surat Edaran Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak. Sekretariat Negara.
- Direktorat jenderal Pajak RI. (2017). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak. Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak RI. (2018). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-14/PJ/2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. PT Niaga Swadaya.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretrariat Negara.
- Kansil, C. S. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustakan.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sekretariat Negara.
- Muliana, V. A. (2017). *Jokowi: Tax Amnesty RI Tersukses di Dunia*. Diambil kembali dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3060385/jokowi-tax-amnesty-ritersukses-di-dunia>
- Mustadir, Moddig, B., & Mursalim. (2020). Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax amnesty. Universitas Muslim Indonesia. doi:<https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.82>
- Muttaqin, Z. (2013). *Tax Amnesty di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nurmantu, S., & Rasmini, M. (2014). Sejarah dan Definisi Pajak. *Dasar-Dasar Perpajakan*, 1-46. Universitas Terbuka. doi:<http://repository.ut.ac.id/4442/1/PAJA3221-M1.pdf>
- Pemerintah Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prastowo, Y. (2016). *Menimbang Manfaat Kebijakan Tax Amnesty*. Jakarta: Center for Indonesia Taxation Analysis.
- Rahayu, N. A. (2020). Analisis Pengawasan pada Wajib Pajak Pasca Tax amnesty dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Pekalongan). Pekalongan: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diambil kembali dari <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1899>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.

- Rasmini, M. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. *Pajak Penghasilan*, 1-41. Universitas Terbuka. doi:<http://repository.ut.ac.id/4448/1/PAJA3230-M1.pdf>
- Rosyadi, T. P. (2018). Mengungkap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty. Universitas Brawijaya. Dipetik January 2022, dari <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5263>
- Saputra, W. (2015). *Realisasi Pajak 2014 Terendah dalam 25 Tahun Terakhir* Diambil kembali dari Kompas: <https://money.kompas.com/read/2015/01/14/122832126/Realisasi.Pajak.2014.Terendah.dalam.25.Tahun.Terakhir>
- Stein, G., Nolan, A., & Suzanne, H. (2015). *Australia: Disclosing your offshore income – Project Do It - today!* Diambil kembali dari mondaq: <https://www.mondaq.com/australia/income-tax/439850/disclosing-your-offshore-income-project-do-it--today>
- Subradiyah, & Aliyah. (2018). The Differences of Taxpayer Compliance Before and After Tax amnesty Stimulus. *JEMA Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen* 15(2):15. doi:10.31106/jema.v15i2.1024
- Sulistiowati, S., & Syaiful, S. (2018). Mengungkap Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty, Vol 1 No 2. <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v1i2.528>.
- Tjakara, H. (2014). Hukum Pajak. *Pengantar Perpajakan*, 1-66. Universitas Terbuka. doi:<http://repository.ut.ac.id/3845/1/EKSI4202-M1.pdf>
- Utara, A. S. (2011). Pengantar Hukum Pajak. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Wahda, N. S., Bagianto, A., & Yuniarti, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2. doi:<https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp115-143>
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Zulvina, S., Aribowo, I., & Bandiyono, A. (2017). Pengantar Hukum Pajak. Politeknik Keuangan Negara STAN.